

Analisis Alokasi Anggaran dan Efektivitas Infrastruktur pada Keterlambatan Proyek Strategis Kabupaten Sidoarjo

Naylarossi Isabella Rokim Putri¹, Marcela Novia Yolanda², Revienda Anita Fitrie³, Eva Hany Fanida⁴

^{1,2,3,4}S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674179@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674178@mhs.unesa.ac.id², reviendafitrie@unesa.ac.id³, evafanida@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 23 April 2026

Revised: 21 Mei 2026

Accepted: 04 Juni 2026

Keywords:

Alokasi
Anggaran, APBD,
Infrastruktur, Efektivitas,
Keterlambatan Proyek.

Abstract: Pentingnya pengalokasian anggaran daerah dan tingkat efektivitas infrastruktur terletak pada perannya sebagai indikator utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyediaan ruang fasilitas publik terbuka yang berkualitas dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi anggaran dan efektivitas pelaksanaan infrastruktur terhadap keterlambatan proyek strategis di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen portal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dokumen regulasi perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran infrastruktur telah direncanakan dan ditetapkan dengan harapan selesai sesuai target, namun efektivitas pelaksanaan proyek masih belum optimal yang ditandai dengan keterlambatan proyek betonisasi Jalan Bringinbendo, revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo, dan pembangunan rumah pompa Kedungpeluk, disebabkan faktor teknis, manajerial, dan administratif seperti kendala lapangan, cuaca, lemahnya koordinasi, serta kurang pengawasan secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya anggaran tidak menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang oleh beberapa koordinasi, pengelolaan proyek dengan baik, serta sistem pengawasan yang efektif.

PENDAHULUAN

Anggaran pada sektor publik digunakan untuk akuntabilitas dan pengelolaan, serta dipergunakan untuk melaksanakan program dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah. Pemerintah menggunakan anggaran belanja untuk mendanai terkait program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran. Anggaran bagian dari rencana keuangan yang menunjukkan keputusan kebijakan institusi untuk masa depan (Kanalung et al., 2018). Anggaran negara dan daerah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Anggaran tidak hanya sejumlah dana yang tersedia, anggaran mencerminkan prioritas kebijakan publik dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Khuluq & Rahmawati, 2025). Dalam konteks proyek infrastruktur, anggaran menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan proyek karena berkaitan langsung dengan perencanaan (*budget planning*), ketepatan waktu penyelesaian proyek (*project completion time*), dan kualitas infrastruktur (*infrastructure quality*) yang akan dihasilkan (Setiawan & Effendy, 2021). Anggaran yang direncanakan dengan matang dan diawasi secara ketat mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik, meminimalkan pemborosan, mempercepat penyelesaian proyek, dan menjamin hasil infrastruktur berkualitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita (Panjaitan et al., 2019). Infrastruktur yang memadai berperan dalam menurunkan biaya logistik, memperluas akses pasar, dan mempercepat arus distribusi barang dan jasa (World Bank, 2022). Selain itu, infrastruktur yang baik juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik (Suharli et al. 2021). Infrastruktur dapat dipandang sebagai katalisator pembangunan karena keberadaannya mampu menciptakan keterhubungan antar wilayah, mengurangi biaya transaksi, serta memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi kompetisi ekonomi global yang semakin ketat. Dengan tersedianya infrastruktur yang berkualitas, aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, dan integrasi pasar menjadi lebih luas sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata (Aisyah, 2025). Dalam konteks ini, efektivitas pelaksanaan infrastruktur daerah mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan publik serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek yang tepat guna, tepat waktu, dan efisien.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah juga memiliki landasan konstitusional dan hukum administratif yang jelas. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** memberikan dasar bagi desentralisasi dan otonomi daerah melalui mandat pengelolaan urusan pemerintahan sendiri, termasuk pembangunan infrastruktur. Hal ini diperkuat oleh **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewenangan daerah dalam merencanakan, menganggarkan, serta mengawasi pembangunan fisik di wilayahnya sendiri (UU Pemerintahan Daerah No. 23/2014). Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan daerah, dan peningkatan daya saing daerah.

Perencanaan dan alokasi anggaran merupakan tahap awal yang menentukan potensi keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan **APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025**, total belanja daerah dialokasikan untuk infrastruktur strategis seperti betonisasi jalan, revitalisasi alun-alun, dan pembangunan fasilitas pengendali banjir. Proyek-proyek tersebut meliputi a) betonisasi Jalan Desa Bringinbendo; b) revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo; c) pembangunan Rumah Pompa Kedungpeluk, yang memiliki target fisik dan finansial yang harus dicapai sesuai jadwal kontrak (Sidoarjo Government, 2025). Meskipun alokasi anggaran besar, efektivitas proyek tidak selalu tercapai akibat tantangan dalam manajemen, koordinasi antar unit, serta pengawasan internal yang masih perlu diperkuat.

Keterlambatan proyek konstruksi merupakan kondisi ketika waktu penyelesaian proyek melebihi jadwal yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Keterlambatan implementasi proyek secara general selalu memunculkan dampak yang menyulitkan bagi pemilik atau kontraktor dikarenakan dampak keterlambatan ialah konflik dan perbantahan mengenai siapa dan apa yang merupakan penyebab pengeluaran tambahan dan desakan waktu. Perampungan pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu adalah kelemahan dari tingkat produktivitas dan telah pasti keseluruhan ini akan berakibat pada inefisiensi dalam pembiayaan (Kusmaran, 2021).

Keterlambatan proyek memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat mengalami tertundanya fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Pemerintah daerah menghadapi pembengkakan biaya, risiko sanksi kontraktual, dan turunnya kepercayaan publik (Juanda et al., 2025). Hambatan administratif dan manajerial menjadi penyebab utama keterlambatan (Setiawan & Effendy, 2021). Selain itu, pengelolaan anggaran yang tidak fleksibel memperburuk risiko proyek. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko secara berkelanjutan menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan pengawasan internal pemerintah yang efektif dan antisipatif (Dwina Putri, 2026).

Faktor keterlambatan proyek tidak hanya berasal dari pihak kontraktor, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh perencanaan internal pemerintah daerah dan koordinasi antarinstansi yang kurang optimal. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi serta pengawasan yang tidak konsisten dapat menyebabkan pelaksanaan proyek tidak berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, keterlambatan proyek infrastruktur juga merupakan permasalahan umum dalam sektor konstruksi di Indonesia yang dapat berdampak pada peningkatan biaya proyek, penurunan kualitas pekerjaan, serta terganggunya pelayanan publik kepada masyarakat (Surri & Alfianto, 2025). Faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek, antara lain faktor teknis, manajerial, dan administratif yang saling berkaitan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam konteks pembangunan daerah, keterlambatan proyek dapat menurunkan efisiensi penggunaan anggaran publik serta menghambat pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, evaluasi berkala, serta koordinasi antar unit menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko keterlambatan proyek infrastruktur di daerah.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur menjadi penting untuk dilakukan. Pengelolaan anggaran yang efektif tidak hanya berkaitan dengan besarnya alokasi dana, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap proyek dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat guna, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Dalam konteks pembangunan daerah, analisis terhadap keterlambatan proyek dapat memberikan gambaran mengenai kualitas perencanaan anggaran, koordinasi antar instansi, serta efektivitas sistem pengawasan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi anggaran dan efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur strategis di

Kabupaten Sidoarjo serta mengidentifikasi faktor faktor yang menyebabkan keterlambatan proyek. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan pengelolaan anggaran publik dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kepustakaan merupakan desain penelitian yang membatasi lingkup aktivitasnya pada telaah bahan-bahan koleksi pustaka tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung. Sejatinya, studi literatur bukan sekadar kegiatan membaca dan mengumpulkan referensi sebagaimana persepsi umum, melainkan sebuah metode ilmiah yang sistematis. Sebagai suatu prosedur riset, penelitian pustaka mencakup rangkaian kegiatan yang terstruktur, mulai dari teknik pengumpulan data, kurasi literatur, hingga proses pengolahan dan analisis bahan penelitian untuk menjawab rumusan masalah secara mendalam (Wardah et al., 2023). Penelitian ini untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Pendekatan ini memungkinkan mengkaji berbagai konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran publik dan keterlambatan proyek infrastruktur.

Melalui pendekatan ini, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur daerah. Metode ini juga membantu memberikan pemahaman mengenai hubungan antara perencanaan alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, tingkat efektivitas, serta kualitas hasil pembangunan infrastruktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal akademik, buku, artikel dengan topik yang terkait, dokumen pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur daerah. Literatur yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian, yaitu:

1. Dokumen resmi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025
2. Dokumen regulasi dan perundang-undangan
3. Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyeleksi berbagai sumber pustaka yang relevan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan tema seperti pengelolaan anggaran publik, manajemen proyek konstruksi, dan faktor-faktor keterlambatan proyek infrastruktur. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui proses penelaahan, perbandingan, dan interpretasi informasi dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pencarian studi literatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai perangkat utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah yang digunakan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik. Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator kunci keberhasilan pembangunan, terutama melalui belanja modal untuk infrastruktur yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan yang efektif

memastikan dana digunakan secara optimal, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana dianalisis dalam berbagai studi kasus kinerja keuangan daerah (Arizona Jesica, 2025).

POSTUR APBD
Kab. Sidoarjo
Tahun 2025

Keterangan: Data APBD 2025, realisasi APBD 2024 dan APBD 2023 - data di bawah ini adalah data realisasi

Akron	Anggaran 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Daerah	5.048.200,00	5.048.200,00	100,00
PNJ	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Tidak Jarak	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
PNJ	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Pendapatan Lainnya	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Belanja Daerah	5.048.200,00	5.048.200,00	100,00
Belanja Pegawai	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Belanja Modal	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Belanja Lainnya	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Pendapatan Daerah	5.048.200,00	5.048.200,00	100,00
Pendapatan Lainnya	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Belanja Daerah	5.048.200,00	5.048.200,00	100,00
Belanja Pegawai	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Belanja Modal	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Belanja Lainnya	1.055.400,00	1.055.400,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00
Saluran Perantara	200.000,00	200.000,00	100,00

Gambar. 1 Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo 2025

Source: djpk.kemenkeu

Dalam struktur belanja daerah, terdapat alokasi belanja modal tersebut yang secara langsung berkaitan dengan adanya program pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap daerah. Besar alokasi anggaran belanja tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah, khususnya pada sektor infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan kualitas ruang pelayanan publik.

Namun demikian, besarnya alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dan direncanakan tidak selalu berjalan lurus dengan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Dalam praktik pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan keterlambatan proyek dengan ketidaksesuaian antara perencanaan, target, dan realisasi perencanaan di lapangan. Hal ini, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga dengan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap proyek infrastruktur.

1. Alokasi Anggaran dan Target-Realisasi Proyek Infrastruktur

Untuk menentukan langkah awal suatu keberhasilan pelaksanaan proyek infrastruktur adalah adanya alokasi anggaran. Pada program pembangunan daerah, perencanaan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembiayaan saja, tetapi sebagai dasar dalam menetapkan target waktu penyelesaian sesuai dengan standar capaian kinerja proyek. Dalam hal ini, kesesuaian antara alokasi anggaran, target waktu, dan realisasi proyek menjadi indikator penting dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Tabel. 1 Alokasi Anggaran dan Efektivitas Realisasi

No	Proyek	Anggaran	Target	Realisasi
1	Betonisasi Jalan Bringinbendo, Taman	Rp10 Miliar	Desember 2025	Keterlambatan dengan deviasi 22%
2	Revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo	Rp24,6 Miliar	Desember 2025	Melebihi target hingga awal 2026
3	Rumah Pompa Kedungpeluk	Rp7,2 Miliar	Desember 2025	Diberikan perpanjangan waktu karena mengalami deviasi 46%

Source: sidoarjo.go.id

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa ketiga proyek infrastruktur memiliki kesamaan target penyelesaian pada bulan Desember 2025, seluruhnya mengalami permasalahan keterlambatan dengan tingkat deviasi yang berbeda-beda. Proyek betonisasi Jalan Bringinbendo mengalami keterlambatan dengan deviasi sekitar 22% dari target, bahkan proyek revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo melampaui target waktu hingga memasuki awal tahun 2026. Sementara itu, proyek pembangunan rumah pompa Kedungpeluk mengalami deviasi yang lebih besar mencapai 46%.

Meskipun secara alokasi anggaran telah ditetapkan dengan jelas, ketidaksesuaian target dan realisasi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengendalian proyek, serta kemampuan manajemen proyek, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun administratif. Kendala dalam pengawasan tersebut menyebabkan pelaksanaan proyek tidak optimal.

2. Analisis Efektivitas Infrastruktur pada Keterlambatan Proyek

Efektivitas pembangunan infrastruktur tentu tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari sejauh mana proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan target perencanaan awal, serta dapat menciptakan kualitas yang diharapkan. Efektivitas mencerminkan tingkat ketercapaian tujuan dengan target yang ditetapkan dalam anggaran, sementara efisiensi menunjukkan sejauh mana suatu pelaksanaan proyek yang dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal (Trianto, 2013). Oleh karena itu, keterlambatan proyek menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur seberapa besar tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

a. Proyek Betonisasi Jalan Bringinbendo

Proyek betonisasi jalan Desa Bringinbendo merupakan program pemerintah daerah yang berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi. Proyek jalan ini mempunyai peran penting sebagai jalur penghubung yang dapat mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, sehingga optimalisasinya menjadi hal mendasar dalam menjamin keberhasilan dan efisiensi. Dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan jalan, serta dapat mengurangi kerusakan yang sering terjadi pada jalan berbahan aspal.



Gambar 2. Proyek Betonisasi Jalan Bringinbendo, Taman, Sidoarjo

Source: radarsidoarjo.id

Meskipun memiliki alokasi anggaran yang cukup besar, pelaksanaan proyek ini di lapangan menghadapi tantangan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan tingkat deviasi mencapai 22% dari target yang ditetapkan. Sehingga, dengan angka deviasi yang cukup signifikan ini menjadi penanda kuat bahwa efektivitas pelaksanaan proyek di lapangan belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan. Hambatan utama adalah kerumitan kendala teknis, mulai dari kondisi stabilitas tanah yang tidak terduga karena dinilai tingginya intensitas hujan yang akan menimbulkan genangan air, sehingga akan menghambat proses pemasangan beton. Hal ini, menjadikan waktu pengerjaan harian sering kali tidak memenuhi masa kontrak yang direncanakan, serta berujung pada penjatuhan sanksi denda kepada kontraktor.

Urgensi penyelesaian proyek ini ditekankan oleh Bupati Sidoarjo yang fokus terhadap keberhasilan sebuah pembangunan diukur dari ketepatan waktu dan kualitas output, bukan dinilai dari denda penalti yang dikumpulkan. Dengan segala peringatan sisa waktu pengerjaan dari perencanaan kontrak yang ditetapkan, terdapat kekhawatiran besar yang muncul karena keterlambatan infrastruktur akan menimbulkan dampak, mulai dari kegiatan ekonomi hingga gangguan arus lalu lintas yang dapat merugikan produktivitas masyarakat.

Dalam sisi pengelolaan efektivitas anggaran, keterlambatan dengan alokasi anggaran tersebut belum mampu menghasilkan output yang linear dengan target waktu pengerjaan. Kondisi yang mengisyaratkan adanya ruang manajemen proyek, khususnya pada tahap perencanaan jika terjadi mitigasi risiko, serta pengawasan operasional terhadap dinamika lapangan yang tidak terduga. Dengan perlunya tahap evaluasi menyeluruh, terlebih lagi dalam pengawasan dan perbaikan tata kelola manajemen proyek agar efektivitas proyek dapat ditingkatkan sehingga tidak ada kendala yang terulang kembali.

b. **Proyek Revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo**

Proyek revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo adalah salah satu program pemerintah daerah dalam pembangunan ruang publik terbuka yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta menyediakan fasilitas yang nyaman bagi masyarakat. Dengan adanya anggaran yang sudah ditetapkan,

proyek ini memiliki banyak harapan untuk menjadikan pusat aktivitas sosial dan area rekreasi masyarakat sekitar maupun pendatang.

Dalam pelaksanaannya, proyek ini sudah cukup baik dalam segala perencanaan dan target yang baik dengan harapan akan selesai dengan tepat waktu, namun masih mengalami keterlambatan serta ditemukan beberapa ketidaksesuaian dari kekurangan dalam kualitas pekerjaan. Dengan target waktu pelaksanaan dari awal tahun 2025 hingga akhir tahun 2025, serta target yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo adalah waktu pertengahan bulan November setidaknya 85% pengerjaannya sudah terealisasi, meski diakui ada kekurangan pengerjaan proyek sebesar 8%. Hal ini, menunjukkan efektivitas pelaksanaan dalam klasifikasi keterlambatan waktu adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi.



Gambar 3. Proyek Revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo

Source: kompas.com

Sementara, dari perspektif efektivitas, proyek yang telah mencapai progres sekitar 99,9% yang hampir terealisasi ini ditemukan beberapa kekurangan dalam tingkat penyelesaian sehingga keterlambatan proyek juga berdampak. Ketetapan kontrak awal akan selesai pada Desember 2025, namun pihak jasa mengajukan perpanjangan waktu selama 1 bulan, sehingga batas akhir pengerjaan mundur hingga Januari 2026. Sesuai dengan pengadaan barang dan jasa pada keterlambatan proyek ini berpotensi adanya sanksi finansial bagi kontraktor. Tertundanya hal tersebut menunjukkan kondisi bahwa pelaksanaan proyek pada kontraktor belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, beberapa permasalahan yang terjadi tentu diperlukan tahap evaluasi terhadap sistem pengelolaan proyek, terutama dalam pengendalian kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Penguatan pengawasan serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kontraktor menjadi suatu langkah utama yang penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur ruang publik terbuka.

c. **Proyek Pembangunan Rumah Pompa Kedungpeluk**

Proyek pembangunan rumah pompa Kedungpeluk merupakan proyek infrastruktur dari program pemerintah daerah yang memiliki peran penting sebagai solusi jangka panjang dengan harapan dapat mengendalikan genangan di wilayah

rawan banjir. Pada wilayah Kedungpeluk ini dikenal sebagai salah satu daerah yang rawan genangan air, sehingga melalui optimalisasi rumah pompa ini pemerintah daerah berupaya mempercepat aliran debit air menuju pembuangan akhir secara efektif guna meminimalisir risiko kerugian dan gangguan mobilitas masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya, adanya peninjauan oleh Bupati Sidoarjo yang menyampaikan bahwa kontraktor pelaksana yang mengalami kelambatan dalam menyelesaikan pekerjaannya.



Gambar 4. Proyek Rumah Pompa Kedungpeluk

Source: republiktjtim.com

Proyek yang telah berjalan selama enam bulan sejak dimulai, tetapi progresnya masih jauh dari yang ditargetkan, bahkan mengalami deviasi mencapai 46%. Dengan harapan awal akan selesai tepat dengan waktu yang direncanakan, justru adanya kelemahan pengawasan terhadap kontraktor yang seharusnya memperhatikan dan memaksimalkan pengerjaan yang paling sulit terlebih dahulu. Sehingga, air sungai tidak bisa mengalir karena harus ditutup, awalnya dengan penutupan sungai diharapkan akan cepat justru berakibat banjir pada kawasan tertentu semakin parah. Keterlambatan pengerjaan proyek ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian waktu yang belum maksimal.

Keterlambatan dalam proyek ini tentu memiliki dampak yang cukup serius, dengan berkaitan langsung dengan risiko kawasan banjir yang semakin parah di wilayah tersebut akan mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas keterlambatan proyek tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan penyelesaiannya yang jauh dari target saja, tetapi juga pada aspek sosial dan stabilitas lingkungan setempat. Sehingga, keterlambatan yang berarti akan ada perpanjangan pengerjaan dapat berpotensi menghilangkan kepercayaan publik terhadap efektivitas infrastruktur tersebut.

Sementara itu, dengan adanya keterlambatan pelaksanaannya perlu adanya tahap evaluasi yang cukup tegas yang sebelumnya nilai progresnya berjalan lambat jauh dari yang ditargetkan. Setelah adanya tahap evaluasi, menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dengan progres 70% serta pekerjaan yang paling sulit sudah selesai. Pemilihan solusi dengan pelaksana proyek yang diminta untuk menerapkan sistem kerja tiga shift yang bertujuan untuk mengejar target

operasional dengan harapan akan selesai pada Februari 2026.

Dalam sisi pengelolaan anggaran yang sudah ditetapkan dan direncanakan, seharusnya diperlukan peningkatan efektivitas yang cukup maksimal dalam pelaksanaan proyek tersebut. Selama pengerjaan proyek, pemerintah daerah perlu memastikan adanya pengawasan setiap tahapan pekerjaan akan berjalan sesuai dengan jadwal serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Dengan pencakupan sinkronisasi antara ketersediaan anggaran dengan progres pengerjaan agar tidak terjadi inefisiensi yang berdampak pada kerugian keuangan daerah. Terlebih lagi dengan penguatan tahapan evaluasi kinerja kontraktor yang diharapkan adanya penilaian objektif dan transparan terhadap pihak atasan kerja bukan hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi sebagai langkah preventif untuk menjamin bahwa output pembangunan proyek benar-benar menghasilkan nilai guna yang optimal sesuai yang diharapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa pentingnya peran alokasi anggaran publik sebagai indikator utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pada program pemerintah daerah yaitu pembangunan infrastruktur daerah menyatakan jika keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh ketepatan perencanaan, kualitas pelaksanaan, serta efektivitas pengawasan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merencanakan pengalokasian anggaran melalui APBD Tahun Anggaran 2025, khususnya pada sektor infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan, ruang publik terbuka, dan pengendalian banjir. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berupa keterlambatan proyek. Ketiga proyek yang dianalisis, yaitu betonisasi Jalan Bringinbendo, revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo, dan pembangunan rumah pompa Kedungpeluk, seluruhnya mengalami keterlambatan penyelesaian meskipun telah memiliki target waktu dan anggaran yang jelas. Keterlambatan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, yang mencerminkan belum optimalnya pengelolaan anggaran dari aspek pelaksanaan dan pengawasan, serta adanya faktor intensitas cuaca yang tidak terduga. Sehingga, permasalahan keterlambatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh aspek majerial dan administratif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Sidoarjo masih perlu ditingkatkan. Besarnya alokasi anggaran belum menjamin keberhasilan proyek apabila tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem manajemen proyek dan pengelolaan anggaran agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan tepat waktu, sesuai standar kualitas, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, khususnya dalam penyusunan jadwal pelaksanaan proyek yang lebih realistis dengan mempertimbangkan berbagai risiko di lapangan, seperti kendala teknis, kondisi lingkungan, serta hambatan administratif. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian proyek harus dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat. Peningkatan koordinasi antarinstansi dan komunikasi dengan pihak kontraktor juga menjadi hal yang penting, mengingat lemahnya koordinasi menjadi salah satu faktor utama keterlambatan proyek. Di samping itu, evaluasi terhadap kinerja kontraktor perlu dilakukan secara tegas dan terukur melalui penerapan sistem

penilaian yang jelas serta pemberian sanksi bagi pihak yang tidak mampu memenuhi target pekerjaan sesuai kontrak.

Selanjutnya, pemerintah daerah disarankan untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan proyek, seperti sistem monitoring berbasis digital untuk memantau progres pekerjaan secara real-time guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan sistem manajemen proyek yang lebih modern diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selain itu, untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar tidak hanya menggunakan metode studi literatur, tetapi juga dilengkapi dengan data lapangan seperti wawancara dan observasi langsung agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif dan mendalam terkait permasalahan pengelolaan anggaran dan keterlambatan proyek infrastruktur di daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, Nur. 2025. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Konektivitas Ekonomi Daerah Di Nusa Tenggara Barat." *Economics Note* 1(1):53–59.
- Arizona Jessica. 2025. "Jurnal Impresi Indonesia (JII) Analisis Kebijakan Penggunaan APBD Terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya." *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* Vol. 4, No. 10:3846–57.
- Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, Wiwiek Rindayati. 2019. "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 1(1):43–61.
doi:<https://doi.org/10.2944/jekp.8.1.43-61>.
- Juanda, Koko Bustami, Muhammad Saifrizal. 2025. "Project Performance in Infrastructure Development: Analysis of Time and Quality Control Against Budget Allocation." *Journal Informatic, Education and Management (JIEM)* 7(2):527–35. doi:10.61992/jiem.v7i2.169.
- Jerry Kanalong, Shirly Lumeno, R. J. M. Mandagi. 2018. "Evaluasi Penyelesaian Proyek Infrastruktur Jalan Antara Anggaran Apbd Dan Apbdp Pada Dinas Pu Dan Penataan Ruang Propinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Sipil Statik* 6(8):569–78.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jss/article/view/20256>.
- Kusmaran. 2021. "ANALISA FAKTOR KETERLAMBATAN PEKERJAAN PROYEK (Studi Kasus : Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Sungai Guntung Kec . Kateman Kab .)" *STMJ (Structure Technology Management Journal)* 1(1):15–22.
- Muhammad Husnul Khuluq, Imelda Dian Rahmawati. 2025. "Analysis of Budget Planning, Project Completion Time, and Infrastructure Quality on Budget Efficiency and Effectiveness." *Amkop Management Accounting Review (AMAR)* 5(2):229–49.
doi:10.37531/amar.v5i2.2862.
- Putri, Dwina. 2026. "MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PILAR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH." *Media Akademik (JMA)* 4(1):1–18.
- Setiawan, Endik, and Machmud Effendy. 2021. "Analisa Keterlambatan Proyek Konstruksi Di Kabupaten Sidoarjo Dan Kota Surabaya Berdasarkan Kontrak Kerja." *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur* 3(1):190–99.
doi:10.22219/skpsppi.v3i1.6568.
- Suharli, Suharli, Abdul Wahab, Abdul Hamid Habbe, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, and Sulawesi Selatan. 2021. "APPLICATION OF ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES IN REALIZING MANAGEMENT BANKING WITHOUT INTEREST." 3(2):277–88.
- Surri, Daffa Aqiila, and Imam Alfianto. 2025. "Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek

- Infrastruktur Di Indonesia Dan Strategi Manajemennya: Studi Literatur.” *Journal of Sustainable Construction* 5(1):25–34. doi:10.26593/josc.v5i1.9253.
- Trianto, Anton. 2013. “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG.” 65–77.
- Widiya Wardah, Ahmad Syahruraji, Siti Rokmanah. 2023. “Pentingnya Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Sekolah Dasar.” *Jurnal Dunia Pendidikan* 3(November):67–78.
- World Bank, 2022. *Infrastructure For Development*.

Berita atau Website

- Kabar Baik. 2026. Progres Pembangunan Rumah Pompa Kedungpeluk Sidoarjo 70 Persen, Pertengahan Februari Bisa Difungsikan. <https://kabarbaik.co/progres-pembangunan-rumah-pompa-kedungpeluk-sidoarjo-70-persen-pertengahan-februari-bisa-difungsikan/>
- Kominfo Sidoarjo. 2025. Proyek Rumah Pompa Kedungpeluk Mengalami Deviasi 46 Persen, Bupati Subandi Minta Perketat Pengawasan. <https://www.sidoarjokab.go.id/berita/detail/1767075149/0>
- Kominfo Sidoarjo. 2025. Sidak Proses Pengerjaan Revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo, Wabup Minta Pelaksana Proyek Selesaikan Sesuai Kontrak Pengerjaan. <https://sidoarjokab.go.id/berita/detail/1761023618/0#:~:text=%E2%80%9CTarget%20saya%20dalam%20waktu%20pertengahan%20bulan%20November%2C%20setidaknya%2085%20persen%20pengerjaannya%20sudah%20terrealisasi%2C%E2%80%9Ducapnya>
- Kominfo Sidoarjo. 2026. Progres Rumah Pompa Kedungpeluk 70 Persen, Bupati Sidoarjo Optimis Rampung 14 Februari. <https://sidoarjokab.go.id/berita/detail/1769648657/0>
- Maklumat. 2025. Proyek Rumah Pompa Kedungpeluk Jauh dari Target, Bupati Subandi Ultimatum Kontraktor. https://maklumat.id/proyek-rumah-pompa-kedungpeluk-jauh-dari-target-bupati-subandi-ultimatum-kontraktor/#google_vignette
- Radar Sidoarjo. 2025. Proyek Betonisasi Jalan Bringinbendo-Sidodadi Sekaligus Pembangunan Jembatan di Perbatasan Dusun Bringin Wetan dan Dusun Bringin Kulon. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/857028036/proyek-betonisasi-jalan-dan-jembatan-bringinbendo-taman-sidoarjo-molor-ini-kendalanya#:~:text=RADAR%20SIDOARJO%20%2D%20Proyek%20betonisasi%20Jalan%20Bringinbendo%E2%80%93Sidodadi,tuntas%20meski%20telah%20melewati%20batas%20waktu%20kontrak>
- Radar Sidoarjo. 2026. Proyek Rumah Pompa Kedungpeluk Candi Sidoarjo Masih 67 Persen, Akhir Januari Aliran Sungai Dibuka. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/2601220004/proyek-rumah-pompa-kedungpeluk-candi-sidoarjonmasih-67-persen-akhir-januari-aliran-sungai-dibuka>
- Radar Surabaya Bisnis. 2026. Proyek Revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo Capai 99,9 Persen, Kontraktor Dibayangi Denda Keterlambatan. <https://radasurabayabisnis.jawapos.com/infrastruktur/2187046673/proyek-revitalisasi-alun-alun-sidoarjo-capai-999-persen-kontraktor-dibayangi-denda-keterlambatan>
- Republik Jatim. 2025. Hasil Pekerjaan Molor, Sidak Proyek Infrastruktur di Beringinbendo dan Trosobo, Bupati Sidoarjo Kecwa Berat. <https://republikjatim.com/news-13329-hasil-pekerjaan-molor-sidak-proyek-infrastruktur-di-bringinbendo-dan-trosobo-bupati-sidoarjo-kecwa-berat#:~:text=Hasil%20Pekerjaan%20Molor%2C%20Sidak%20Proyek,Trosobo%2C%20B>

[upati%20Sidoarjo%20Kecewa%20Berat](#)

Republik Jatim. 2026. Proyek Rumah Pompa Kedungpeluk Rp7,2 M Selesai, Bupati Sidoarjo Masih Kecewa Hasil Kerja Kontraktor Minta Dibenahi. <https://republikjatim.com/news-13573-proyek-rumah-pompa-kedungpeluk-rp-72-m-selesai-bupati-sidoarjo-masih-kecewa-hasil-kerja-kontraktor-minta-dibenahi>

Times Indonesia. 2025. Bupati Sidoarjo: Proyek Jalan Beton Bringinbendo Tuntas Desember 2025. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/551803/bupati-sidoarjo-proyek-jalan-beton-bringinbendo-tuntas-desember-2025>

Times Indonesia. 2026. Pembangunan Rumah Pompa Kedungpeluk Sidoarjo Senilai Rp71 Miliar Capai 92 Persen. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/577626/pembangunan-rumah-pompa-kedungpeluk-sidoarjo-senilai-rp71-miliar-capai-92-persen>